Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel

Ulfa Budiana, Muhammad Djafar Saidi

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: budianaub@yahoo.com

Abstract:

This study aims to analyze the effectiveness of tax law enforcement for hotel taxpayers in Bone Regency, South Sulawesi. This research is a socio-legal research law using cases and laws and regulations. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that tax law enforcement against taxpayers who are in arrears in local tax payments in Bone Regency has not been effective. This shows that the performance of Bone Regency Regional Revenue Service officers is not yet optimal, because there are still hotel taxpayers who do not pay at all and do not enforce the law against hotel taxpayers who neglect to carry out their obligations. For administrative sanctions, if taxpayers are in arrears, the Bone Regency Regional Revenue Service will send a warning letter. If the warning letter is still ignored, the Regional Revenue Service will send a bill. During this time the Regional Revenue Service of the Bone Regency is still limited to giving warning letters and bills, but no one has been sanctioned with business closure.

Keywords: Effectiveness; Tax law; Hotel; Taxpayer

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pajak bagi wajib pajak hotel di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan kasus dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kabupaten Bone belum efektif. Hal ini menunjukkan kinerja petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone belum maksimal, karena masih terdapat wajib pajak hotel yang tidak melakukan pembayaran sama sekali dan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel yang lalai melakukan kewajibannya. Untuk pemberian sanksi administratif, jika wajib pajak melakukan penunggakan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone akan mengirimkan surat teguran. Jika surat teguran masih diabaikan maka Dinas Pendapatan Daerah akan mengirimkan surat tagihan. Selama ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih sebatas memberikan surat teguran dan surat tagihan, belum ada yang sampai dititik penutupan usaha.

Kata Kunci: Efektivitas; Hukum Pajak; Hotel; Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Pemungutan pajak diatur pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan merupakan sumber hukum formil, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan Undang-Undang". Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa "kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama".

Bagi daerah, pajak dipilih sebagai salah satu sumber penerimaan daerah karena merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sumber keuangan yang merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, selain sebagai sumber keuangan pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan.¹

Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan, dan
- e. Pajak rokok

Kemudian pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah:

- a. Pajak restoran
- b. Pajak hotel
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet.
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Penggolongan pajak daerah telah bersifat final, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menganut prinsip tertutup karena daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah tersebut diatas. Dalam arti daerah tidak boleh mengadakan pajak daerah yang tidak sesuai dengan jenis-jenis pajak daerah termaksud.

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 34

Pajak daerah juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah. Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan daerah adalah berasal dari pajak.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Secara umum, kesulitan yang dialami selama ini adalah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri.

Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak. Pengusaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya akan terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan. Untuk itu, wajib pajak diuntut untuk lebih taat dalam pengelolaan perhitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak.

Tingkat pemungutan pajak berkaitan dengan tingkat keefektifan penagihan, yaitu perbandingan antara realisasi pemungutan pajak dengan besaran jumlah pajak yang ditetapkan. Hasil perbandingan tersebut idealnya harus menunjukkan angka 100%, artinya besaran pajak yang ditetapkan berhasil dipungut seluruhnya, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, karena dalam pemungutan pajak daerah menemui beberapa kendala-kendala, salah satunya telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menaati aturan perpajakan.

Salah satu pemungutan pajak daerah kabupaten/kota yaitu pajak hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang pembangunan hotelnya dari 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan atau terus bertambah. Hotel merupakan salah satu sarana penginapan atau tempat tinggal sementara selama berada di Kabupaten Bone. Hotel digunakan juga sebagai sarana bermain dan berkumpul, pesta ulang tahun, pernikahan, dan acara lainnya. Sesuai peraturan daerah kabupaten Bone tentang pajak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2009, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

Bertambahnya jumlah hotel tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor pajak. Tetapi dalam pungutan pajak hotel di Kabupaten Bone bukan tidak menemui kendala, dari hasil wawancara dengan Andi Dian,² didapatkan informasi bahwa “dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bone, banyak ditemui wajib pajak yang tidak taat dalam pembayaran pajaknya. Wajib pajak yang tidak taat dikarenakan wajib pajak hotel merasa berat dengan besaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan besaran yang ditetapkan. Selain itu kendala lainnya adalah wajib pajak hotel tidak melaporkan atau memberikan data real jumlah pengunjung yang datang. Hal ini diketahui setelah petugas pajak turun langsung memeriksa dengan menghitung jumlah pengunjung yang datang tiap harinya, setelah ditemukan kecurangan yang dilakukan wajib pajak, tentu petugas pemungutan pajak memberikan langkah-langkah penegakan hukum bagi wajib pajak hotel yang tidak taat”.

Berdasarkan paparan tersebut, memperlihatkan bahwa ada beberapa kendala saat pemungutan pajak hotel yang di temui oleh petugas pajak. Kendala-kendala tersebut tentu akan berpengaruh untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak yang terjadi karena wajib pajak yang tidak taat. Agar dalam proses pemungutan pajak hotel berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan tentu wajib pajak hotel harus taat dalam pembayaran pajak. Tetapi faktanya tidak demikian, hal ini tentu akan menjadi peran penting pemerintah daerah dalam menerapkan penegakan hukum bagi wajib pajak.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan kasus dan peraturan perundang-undangan.³ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fokus penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Hotel. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Bone

Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial.⁴ Otonomi daerah yang merupakan wujud atas pelaksanaan asas desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal mengatur seluruh urusan yang menyangkut kepentingan daerahnya sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada pada daerahnya.⁵ Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat salah satu aspek penting yaitu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan keuangan bagi daerahnya, yang berguna untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerahnya melalui desentralisasi fiskal.⁶

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang fiskal dikeluarkan suatu peraturan yang dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan

² Hasil wawancara pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Bone

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 96

⁴ Hari Sabarno, *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 3

⁵ Achmad Ruslan, 2011, *Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Negara*, Orasi Guru Besar, hlm. 6

⁶ Triska, dkk, *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD Berdasarkan Perda No.*

1 Tahun 2012, Studi di Kota Ambon, Maluku, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 3

daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, diiringi dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya.⁷

Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan agar dapat menciptakan atau memwujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan atau mewujudkan akan hal ini maka perlu peran serta juga kesadaran yang penuh dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Bentuk peran serta tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan Pajak Daerah. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan suatu rambu-rambu bagi Pemerintah Daerah dalam membangun daerah dan menggali potensi daerah tersebut melalui sektor pajak dan retribusi. Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kesiapan dan konsekuensi yang tinggi serta memiliki program kerja yang mantap dan juga terarah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang ada terutama dari pos asli daerah. Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai objek pajak hotel, jasa pengunjung, yang tidak termasuk objek pajak hotel, subjek pajak hotel, wajib pajak hotel, tarif pajak hotel, besarnya pokok tarif pajak hotel dan wilayah pemungutan pajak hotel di setiap daerah.⁸

Menurut Riwo Josepf, untuk menjalankan tugas pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya setelah otonomi daerah diberikan kepada suatu wilayah, maka ada 4 (empat) faktor yang perlu diperhatikan dan itu merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:⁹

1. Faktor Pelaksanaan;
2. Faktor keuangan;
3. Faktor Fasilitas; dan
4. Faktor Organisasi dan manajemennya harus baik;

Kriteria Pajak Daerah adalah Bersifat pajak, dan bukan retribusi; Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan; Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor; Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.¹⁰

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi, artinya hasil pajak hotel berpotensi cukup besar dan baik sebagai sumber pendapatan daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sebagai salah satu daerah otonom maka Kabupaten Bone dalam melaksanakan pembangunan diwujudkan dengan membentuk prakarsa, yaitu dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi penerimaan pajak daerah. Bagi Kabupaten Bone, usaha perhotelan merupakan salah satu usaha yang berpotensi sangat baik, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan agar dapat

⁷Ibid.

⁸ Ibid., hlm. 3-4

⁹ Riwo Kaho Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi factor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 66

¹⁰ Triska, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 4-5

menggali potensial dalam sektor perhotelan dengan sangat maksimal sebagai pendapatan asli daerah guna sebagai pelaksanaan otonomi daerahnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alimuddin,¹¹ ia menjelaskan bahwa:

Usaha perhotelan di Kabupaten Bone sangatlah menjanjikan, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan daerah yang dilaksanakan baik dari skala kabupaten/kota, skala provinsi, bahkan hingga skala nasional, kegiatan-kegiatan tersebut, utamanya yang berskala provinsi dan skala nasional banyak mengundang tamu dari luar, sehingga jasa hotel inipun secara tidak langsung ikut mendukung industry pariwisata di Kabupaten Bone.

Hal ini sesuai dengan dasar pengenaan pajak hotel bagi wajib pajak hotel didasarkan pada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel, sehingga pengenaan pajak tersebut juga ada dasar hukumnya yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan pemerintah daerah dalam memungut pajak.

Penegakan hukum pajak bermakna sebagai langkah bagaimana menegakkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak. Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 menyatakan penegakan hukum bisa dilakukan dengan dua cara yakni cara administrasi atau pidana. Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel di Kabupaten Bone adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dimana fungsi dan peran pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah juga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, serta tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pentingnya fungsi dan peran Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang di harapkan.

Setiap penegak hukum selalu memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan itu pada hakekatnya merupakan suatu wadah yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan istilah "peranan". Oleh karena itu setiap orang yang memiliki kedudukan disebut sebagai pemegang peranan. Peranan itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: peranan yang seharusnya, peranan yang ideal dan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan.¹²

Berdasarkan teori sumber kewenangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menyebutkan bahwa atribusi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan secara langsung, dan disebut pula dengan pelimpahan wewenang yang asli. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang

¹¹ Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, wawancara pada 26 Mei 2018

¹² Radisman F.S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta: Ind_Hill, Co., 1985, hlm. 14

baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Dalam konteks ini wewenang yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam menagih pajak hotel kepada wajib pajak hotel didasarkan pada kewenangan atribusi yang didasarkan pada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.

Sebelum melakukan rangkaian penegakan hukum ataupun pemungutan pajak, hal yang pertama dilakukan adalah diadakan tahapan sosialisasi mengenai pajak hotel. Hal ini dimaksudkan agar setiap wajib pajak hotel mengetahui aturan hukum pemerintah daerah tentang pajak hotel dan dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku, aturan hukum dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.

Pada kenyataannya, meskipun sebelumnya telah diadakan sosialisasi namun masih ada beberapa wajib pajak hotel yang melakukan penunggakan. Melihat kondisi ini, maka untuk mengetahui apakah wajib pajak hotel yang menunggak di Kabupaten Bone yang dijadikan responden mengetahui dan memahami tentang kewajiban untuk membayar pajak hotel, dapat dilihat pada Chart 1.

Chart 1. Pengetahuan dan pemahaman responden tentang Kewajiban Pajak Daerah

Sumber: Data Primer, 2018 (diolah)

Terlihat bahwa mayoritas (75%) wajib pajak hotel yang menunggak pajak hotel di Kabupaten Bone yang dijadikan responden menyatakan cukup mengetahui dan memahami tentang kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan sisanya (25%) wajib pajak yang menunggak pajak daerah di kabupaten bone yang dijadikan responden menyatakan mengetahui tetapi tidak memahami kewajiban untuk membayar pajak.

Apabila melihat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak hotel yang menunggak pajak di Kabupaten Bone yang dijadikan responden seperti tersebut di atas, maka sangat tidak mungkin jika mereka tidak mengetahui kewajiban untuk membayar pajak daerah, malah seharusnya mereka melakukan pembayaran pajak hotel secara tepat waktu.

Hal ini menunjukkan kinerja petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone belum maksimal, karena masih terdapat wajib pajak hotel yang tidak melakukan pembayaran sama sekali dan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel yang lalai melakukan kewajibannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel dan makin bertambahnya jumlah hotel di Kabupaten Bone, maka diharapkan agar dapat mengefektifkan pemungutan pajak hotel guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone. Atas dasar tersebut, berkenaan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotel di Kabupaten Bone, maka sangat berhubungan dengan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan upaya mengefektifkan penegakan hukum terhadap wajib pajak di Kabupaten Bone, Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone melakukan upaya seperti:

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2018 telah memasang alat perekam transaksi yang disebut Mobile Proccesing Self System (MPOSS) yang berkoneksi langsung dengan Kas Daerah bahkan telah di koneksikan dengan Komisi Pemberantasan Bidang Pencegahan (Korsupda KPK RI). Jadi melalui MPOS ini, transparansi pembayaran wajib pajak hotel sangat jelas dan setiap pembayaran pajak akan langsung masuk ke Kas daerah jadi bagi wajib pajak maupun petugas pajak tidak dapat melakukan kecurangan.¹³

Dalam hal penerimaan pajak dalam sektor pajak hotel-pun demikian yang perlu diperhatikan adalah efektivitas pemungutannya karena jika dalam pemungutannya tidak efektif maka penerimaan pajak di sektor pajak hotel tidak akan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Dalam proses pemungutan pajak terdapat banyak faktor-faktor baik yang bisa dikatakan sebagai faktor pendukung dan sebagai faktor penghambat dalam pemungutan yang dapat mengakibatkan efektif atau tidak efektifnya pemungutan pajak tersebut.

Untuk pemberian sanksi administratif, jika wajib pajak melakukan penunggakan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone akan mengirimkan surat teguran. Jika surat teguran masih diabaikan maka Dinas Pendapatan Daerah akan mengirimkan surat tagihan. Selama ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih sebatas memberikan surat teguran dan surat tagihan, belum ada yang sampai ditutupan usaha.¹⁴

4. Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Bone

Perpajakan daerah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem dan permasalahan pelaksanaan pajak-pajak. Masalah perpajakan dapat ditinjau dari berbagai perspektif yaitu hukum, politik, sosial, ekonomi, administrasi dan akuntansi. Namun, di banyak negara pada dasarnya perspektif yang digunakan untuk melihat masalah perpajakan ada 2 (dua) yaitu perspektif hukum dan perspektif ekonomi.

¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Alimuddin (Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone), wawancara pada 26 Mei 2018

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Alimuddin (Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone), wawancara pada 26 Mei 2018

Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini juga sering disebut dengan aspek legalitas.¹⁵

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Perspektif ini juga sering disebut pendekatan aspek keuangan daerah.

Sistem perpajakan daerah (*tax system*) adalah pola pelaksanaan perpajakan yang terkoordinasi secara serasi, meliputi: *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat, maka ketiga faktor tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis (sinergis). Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menunjang penerimaan daerah.

Tax Policy adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang berlaku sesuai perkembangan, tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah. *Tax policy* hanyalah merupakan bagian dari fiscal policy, misalnya tax reform yang dilakukan tahun 1983. Adanya *tax reform* ini pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, dalam rangka untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan negara dan bangsa.

Tax Reform pajak daerah merupakan bagian dari tax reform secara nasional, terjadi pada tahun 1983. Karena pada tahun 1983 ini terjadi perubahan yang sangat mendasar dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dari *official assessment system* (berlaku sampai dengan tahun 1984). Tujuan utama *tax reform* adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak, pajak untuk menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional.

Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, yakni yang bertugas melakukan penagihan pajak hotel terhadap para wajib pajak hotel di Kabupaten Bone, petugas seyogianya harus mempunyai pedoman, antara lain peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang kerja dan tugasnya. Kelemahan di lingkungan aparat pemerintah daerah, baik pejabat yang mengambil keputusan penetapan pajak, maupun pelaksana lapangan dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak serta minimnya ketersediaan *data base* potensi objek pajak.

Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemerintah daerah dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan toleransi dalam melakukan penegakan hukum. Masih lemahnya pengawasan oleh para penegak hukum termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai dengan ketentuan

¹⁵ Soemitro, *Asas-Asas Perpajakan*, Bandung: PT. Eresco, 2003, hlm. 38

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terjadi penyimpangan ataupun penyalagunaan.¹⁶

Begitupun dengan jumlah penegak hukum yang harus turun ke lapangan dalam mendata atau melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Untuk itu kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan di Kabupaten Bone harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Faktor yang mendukung dalam penerimaan pajak yaitu sarana/fasilitas pendukung. Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sarana/fasilitas pendukung yang cukup dalam pemungutan pajak. Sarana/fasilitas pendukung yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini kendaraan, baik kendaraan roda dua (motor), atau pun kendaraan roda empat (mobil) sebagai alat transportasi sangat diperlukan karena letak lokasi objek pajak saling berjauhan yang apabila pelaksanaan pemungutannya tidak dilengkapi oleh sarana tersebut maka akan menambah beban biaya pungut semakin besar. Dan ketetapan waktu pelaksanaan pemungutan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dengan sendirinya akan mengurangi penerimaan pajak tersebut.¹⁷ Apalagi Kabupaten Bone yang wilayahnya sangatlah luas, sehingga tanpa sarana/fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka mustahil para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal.

Ketersediaan sarana/fasilitas pendukung sangat penting perannya dalam pencapaian tujuan suatu usaha dalam hal ini untuk mengoptimalkan pemungutan pajak. Sarana dan Fasilitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sesuatu untuk mencapai tujuan yang ruang lingkupnya terutama adalah secara fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Dengan fasilitas yang kurang memadai maka mengakibatkan kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo.

Dengan adanya faktor sosial dan faktor personal yang ikut menentukan peranan seorang pemegang peran, maka peranan itu dapat sesuai atau mungkin bertentangan dengan apa yang telah ditentukan di dalam norma hukum. Sebagai tokoh panutan yang peranannya tidak terlepas dari pengaruh faktor personal, maka mental aparat penegakan hukum harus baik agar mampu menegakkan hukum secara konsekuen. Dalam konteks Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotel di Kabupaten Bone, maka hambatan yang timbul dari faktor penegak hukum adalah karena ada beberapa wajib pajak hotel di Kabupaten Bone yang mempunyai kerabat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.¹⁸

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seringkali wajib pajak hotel di Kabupaten Bone Tidak Melaporkan pendapatan dan objek pajak mereka sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini tentu merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dan untuk mengatasi hal tersebut Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menugaskan 2 orang pegawai untuk melakukan pengawasan dengan mendatangi setiap

¹⁶ Triska, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 17

¹⁷ Triska, dkk, *Ibid.*, hlm. 18

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan A. Hardianti (salah satu pegawai bagian penagihan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya), pada 4Juni 2018

hotel yang ada di kabupaten Bone untuk melihat langsung aktivitas dan objek pajak yang ada di hotel tersebut.

Hal tersebut merupakan budaya hukum, hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berfikir masyarakat tersebut. Sebagai konsekuensinya, warga masyarakat itu harus mentaati hukum, sebab jika tidak demikian maka warga masyarakat itu sendiri yang menodai hasil kebudayaannya.¹⁹ Dengan melihat kondisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel di Kabupaten Bone belum efektif dan belum maksimal.²⁰

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, dalam penelitian ini adalah seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bone memiliki peran yang penting di dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah ditopang oleh kemampuan dari petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone di dalam menjalankan perannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel merupakan salah satu komponen substansi hukum. Komponen substansi ini dapat memberikan kepastian bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah. Terkait dengan budaya hukum ini, pajak daerah merupakan produk sistem hukum yang cara pemungutan dan pengelolaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan dari wajib pajak. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat (Wajib Pajak) menilai dan berkeyakinan bahwa pajak daerah yang dipungut tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone, maka tujuan pemungutan pajak daerah akan tercapai sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone.

5. Penutup

Penegakan Hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kabupaten Bone belum efektif. Hal ini menunjukkan kinerja petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone belum maksimal, karena masih terdapat wajib pajak hotel yang tidak melakukan pembayaran sama sekali dan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel yang lalai melakukan kewajibannya. Untuk pemberian sanksi administratif, jika wajib pajak melakukan penunggakan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone akan mengirimkan surat teguran. Jika surat teguran masih diabaikan maka Dinas Pendapatan Daerah akan mengirimkan surat tagihan. Selama ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih sebatas memberikan surat teguran dan surat tagihan, belum ada yang sampai titik penutupan usaha. Untuk itu, diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk lebih tegas memberikan penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel tanpa harus terpengaruh oleh kerabat yang dimiliki oleh wajib pajak hotel (tidak pandang bulu) sehingga memberikan efek jera.

¹⁹Radisman F.S. Sumbayak, 1985, *Op.Cit.*, hlm. 31

²⁰Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W Norton and Company, Tahun 1984, hlm. 7-

Referensi

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Penerbit Identitas Univ. Hasanuddin.
- Arsyad Mawardi, *Pengawasan dan Keseimbangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam System Ketatanegaraan Republic Indonesia*, Semarang 2013.
- Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga; Jakarta 2016.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Musakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Riwu Kaho Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi factor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soemitro, *Asas-Asas Perpajakan*, Bandung: PT. Eresco, 2003.
- Sondang Edward Situngkir, *Penegakan Hukum Bidang Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (Studi di Kota Pontianak)*, Jurnal Media Neliti, 2013.
- Triska, dkk, *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Studi di Kota Ambon, Maluku*, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya, 2014.